Buletin
ISEN MULANG
edisi : 312 / Oktober 2020
Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Plt. Gubernur Kalteng Minta Media Proaktif Meluruskan Pemberitaan Seputar UU Cipta Kerja 4

Plt. Gubernur Kalteng Resmi Melepas Bantuan Sosial Beras Untuk Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Seruyan 8

TANDAI DIMULAINYA PROGRAM FOOD ESTATE, PRESIDEN JOKO WIDODO TINJAU LOKASI TANAM PERDANA DI BELANTI SIAM

PRESIDEN RI SERAHKAN BANTUAN PRODUKTIF UMKM BAGI MASYARAKAT PULANG PISAU 19

diterbitkan oleh Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah

DITERBITKAN BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 188.44/

Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Adminidtrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan Dokumentasi pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Redaktur :

Setya SRI Saryanta

Penyedia Bahan :

Rani Diah Anggraini

Staf Redaksi :

Dewi Yulianti, Dina Meitriana, Kamala Sri Y. R., Winda Paskanova, Renny Patrisia, Nova Anggreni, Sophia Fitra Djangkan.

Fotografer :

Boy Irawan, Efendy, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo.

Layout :

Benito Zuares

Operator Komputer :

Ahmad Salahudin

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya
Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

DAFTAR ISI ;

TANDAI DIMULAINYA PROGRAM FOOD ESTATE, PRESIDEN JOKO WIDODO TINJAU LOKASI TANAM PERDANA DI BELANTI SIAM_____3

Plt. Gubernur Kalteng Minta Media Proaktif Meluruskan Pemberitaan Seputar UU Cipta Kerja_____4

Plt. Gubernur Kalteng Ikuti Rakor Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020_____5

Peserta Pilkada Serentak Kalteng Tahun 2020 Tanda Tangani Pakta Integritas Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19_____6

DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENJADI FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI STRATEGI JANGKA BENAH_____7

Plt. Gubernur Kalteng Resmi Melepas Bantuan Sosial Beras Untuk Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Seruyan_____8

BAHAS PENGUATAN SDM PERTANIAN DI KALTENG, SEKDA TERIMA AUDIENSI KEPALA BPPSDMP KEMENTAN RI_____9

Sekda Kalteng Hadiri Rakordal dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2020_____10

PEMPROV KALTENG GELAR DIALOG DENGAN TIM KAJIAN DAERAH SETJEN WANTANNAS RI_____11

Plt. Gubernur Kalteng Ikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Secara Virtual _____12

Plt. Gubernur Kalteng Bersama Danrem dan Kapolda Luncurkan Program Si Komos_____12

Plt. Gubernur Kalteng Ikuti Upacara HUT ke-75 TNI Secara Virtual_____13

Plt. GUBERNUR TINJAU RAPID TEST MASSAL DI BARITO UTARA_____14

PLT. GUBERNUR KALTENG TINJAU PERTANIAN BAWANG MERAH DAN JARINGAN IRIGASI DI DESA TRANSBANGDEP, BARITO UTARA_____15

MENHUB TINJAU BANDARA BARU DI BARITO UTARA_____16

Plt. Gubernur Kalteng Panen Padi di Kawasan Food Estate Desa Petak Batuah_____17

PRESIDEN RI SERAHKAN BANTUAN PRODUKTIF UMKM BAGI MASYARAKAT PULANG PISAU_____18

Ketua Umum LASQI Kalteng Hadiri Pembukaan Musda LASQI Murung Raya Tahun 2020_____18

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Sub Bagian Informasi Pemerintahan Umum Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 4200241

Website : http://www.biropkp.kalteng.go.id
Facebook : http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/
Twitter : http://www.twitter.com/setda_kalteng
Instragram : @sekretariat.daerah.kalteng
email : buletin.isenmulang@gmail.com

TANDAI DIMULAINYA PROGRAM FOOD ESTATE, PRESIDEN JOKO WIDODO TINJAU LOKASI TANAM PERDANA DI BELANTI SIAM

BELANTI SIAM – BIRO ADPIM. Menandai dimulainya Program Lumbung Pangan Nasional, Food Estate, di Kalimantan Tengah (Kalteng), Presiden RI Joko Widodo meninjau lokasi penanaman perdana kawasan Food Estate Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (8/10/2020).

Lokasi penanaman perdana tepatnya berada di REI 19 dan 20 dengan luas lahan 10 hektare (Ha) milik 5 anggota Kelompok Tani (Poktan) Panca Makmur. Luas lahan seluruh anggota Poktan Panca Makmur sendiri mencapai 80 Ha. Sementara itu, jenis padi yang ditanam pada penanaman perdana hari ini adalah Inpari 43.

Selepas penyampaian penjelasan panel oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, Presiden Joko Widodo didampingi Plt. Gubernur Habib Ismail Bin Yahya beserta rombongan meninjau sawah dengan berjalan kaki. Di sekitar saung atau pondok, Presiden menyaksikan olah tanah rawa dengan traktor apung dan berdialog dengan operator traktor. Selain itu, Presiden menyaksikan penanaman padi dengan alat tanam rice transplanter dan melihat teknologi pemupukan dengan menggunakan drone.

Saat menyampaikan keterangan pers, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kunjungan kerja kali ini untuk memastikan dimulainya Program Food Estate. “Hari ini, saya kembali lagi ke Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya sekarang ada di Kabupaten Pulang Pisau, kita ingin memastikan dimulainya Food Estate yang semuanya di sini 168.000 Ha akan ditanami padi untuk beras. Di Pulang Pisau tahun 2020 ini akan dikerjakan 10.000 Ha, di Kabupaten Kapuas sekitar 20.000 Ha, sehingga totalnya di Provinsi Kalimantan Tengah 30.000 Ha,” papar Presiden.

Presiden menjelaskan, penggunaan drone dan traktor apung dinilai cukup efektif. “Bisa mengerjakan kira-kira 1-2 Ha per hari dengan 2 kecepatan karena mengerjakan 2 hamparan yang luas, sehingga dibutuhkan mekanisasi alat-alat modern hingga kecepatan itu betul-betul ada,” papar Presiden.

“Kita juga di sini mengkombinasikan antara sawah (tanaman padi) dan di pinggir tanaman jeruk. Kemudian, ada lagi bawang merah, kelapa, bahkan nanti hasil yang dihasilkan bukan hanya padi, tetapi juga jeruk, plus bawang merah,” jelas Presiden lebih lanjut.

“Karena airnya melimpah, di setiap irigasi yang ada juga akan membudidayakan ikan di keramba yang akan kita lihat dalam 3-4 bulan hasilnya seperti apa. Dengan cara-cara ini, kita harapkan pendapatan petani akan naik, tidak hanya dari padi, tetapi juga dari jeruk, bawang, kelapa, ikan, itik. Ini kombinasi, model-model bisnis seperti ini akan kita coba lebih dulu, nanti kita lihat hasilnya. Jika bagus hasilnya, maka kita akan coba di tempat lain per 1.000 Ha lahan,” imbuh Presdiden Joko Widodo.

Luas kawasan Center of Excellent (CoE) Food Estate Desa Belanti Siam mencapai 1.025 Ha yang terletak di REI 5-29, dengan 538 rumah tangga petani di dalamnya. Beberapa teknologi diaplikasikan di kawasan CoE, seperti teknologi pengelolaan air, perbaikan kualitas air, dan pemanfaatan air di lahan pasang surut untuk usaha tani padi unggul dan hortikultura, baik sayuran maupun buah-buahan, termasuk untuk budidaya ikan dan perkebunanan. Pada teknologi budidaya padi di lahan pasang surut, telah diaplikasikan teknologi Rawa Intensif Super Aktual (RAISA) berupa aplikasi bahan-bahan organik, baik pada tanah maupun benih padi unggul yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, seperti varietas Inbrida Padi Rawa dan Inbrida Padi Irigasi.

Komoditas lain yang dapat dipadukan di lahan rawa dan diaplikasikan petani di jawasan CoE, antara lain jeruk, sayuran, kelapa, empon-empon, dan ikan. Sebelumnya, setibanya di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Presiden Joko Widodo disambut Kepala Staf Presiden Moeldoko. Selanjutnya, Presiden beserta rombongan menuju Pulang Pisau menggunakan helikopter. Demikian pula dengan Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya beserta Pangdam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad dan Kapolda Irjen Pol Edi Prasetyo, menuju Pulang Pisau menggunakan helikopter. Selepas mendarat di helipad Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, rombongan langsung menuju lokasi penanaman perdana. (ran/may/dmr/eka)

Plt. Gubernur Kalteng Minta Media Proaktif Meluruskan Pemberitaan Seputar UU Cipta Kerja

PALANGKA RAYA - BIRO ADPIM. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Palangka Raya, Rabu (14/10/2020).

Rakor dibuka oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Sementara bentindak sebagai moderator adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh lambatnya perizinan. “Seingat saya, Undang-Undang Cipta Kerja ini dilatarbelakangi oleh lambatnya perizinan dan terlalu banyaknya meja-meja birokrasi yang harus dilalui kalau orang akan meminta izin usaha. Oleh karena itu, kemudian muncul gagasan Omnibus Law, satu undang-undang yang menyelesaikan problem berbagai undang-undang,” jelas Menkopolhukam.

Menurut Menkopolhukam, ada juga kenyataan bahwa jumlah angkatan kerja bertambah setiap tahunnya. Jumlah tersebut masih ditambah jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), antara lain di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. “Karena itu, harus disediakan lapangan kerja,” imbuh Menkopolhukam yang menambahkan bahwa rencana penyederhanaan perizinan sudah ada sejak presiden-presiden periode sebelumnya.

Lebih lanjut dikatakan Menkopolhukam bahwa Omnibus Law ini sudah dibahas dalam beberapa tingkatan. Oleh karena itu, banyak naskah yang beredar yang tidak sesuai dengan naskah perbaikan terakhir. Menyikapi maraknya aksi demonstrasi akhir-akhir ini, pemerintah pun mengimbau elemen-elemen masyarakat agar tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasinya. “Sejauh unjuk rasa itu ada menyampaikan aspirasi, itu tidak apa-apa, asal tidak melakukan tindak anarkis,” kata Menkopolhukam Mahfud MD.

Sementara itu, disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hari ini DPR akan bersurat kepada Presiden RI Joko Widodo dan Presiden diberi waktu 30 hari untuk menandatangani UU Cipta Kerja. Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki 11 klaster, yakni Klaster Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dalam Rakor hari ini akan dibagikan materi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. “Jadi, Bapak Menkopolhukam dan Bapak Menko Perekonomian bersepakat untuk memberikan bahan-bahan bagi Forkopimda di daerah, sehingga memiliki kesamaan visi, memiliki amunisi dan langkah-langkah yang tidak hanya responsif tetapi juga proaktif,” jelas Mendagri Tito Karnavian.

Disampaikan pula oleh Mendagri bahwa dalam Rakor kali ini disampaikan paparan dan arahan oleh sejumlah Menteri dan pejabat terkait, seperti Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Wakil Jaksa Agung, Sestama Badan Intelijen Negara (BIN) mewakili Kepala BIN, Kababinkum TNI mewakili Kapolri, serta Wakil Irwasum Polri mewakili Kapolri.

“Kita mengambil hal-hal pokok dan sharing bahan-bahan yang bisa dipelajari. Kami akan share softcopy Undang-Undang Cipta Kerja,” imbuh Mendagri yang mengimbau Forkopimda untuk membentuk tim kecil guna membahas dan menjawab pertanyaan masyarakat di daerah masing-masing terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Seusai Rakor, Plt. Gubernur Habib Ismail Bin Yahya mengatakan kepada awak media bahwa Forkopimda diminta untuk membentuk tim kecil terkait pembahasan UU Cipta Kerja. “Arahan yang pertama adalah kita sebagai pribadi dan juga sebagai perwakilan pemerintah pusat diharapkan bisa membaca, mempelajari, dan bikin tim kecil untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja ini. Andaikata ada sesuatu yang memang kurang atau sesuatu yang tidak menguntungkan per daerah kita, silakan diajukan untuk memberi masukan karena nanti Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berdiri sendiri. Pasti ada Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi landasan untuk melaksanakan itu di lapangan,” papar Plt. Gubernur Habib Ismail.

Di samping itu, menurut Plt. Gubernur, Forkopimda juga diminta untuk meluruskan isu-isu tentang UU Cipta Kerja. “Nanti akan kita coba lakukan pendekatan-pendekatan dan memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat karena apa yang mereka tuntut, dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah terakomodir,” katanya.

“Jadi, kita minta media juga proaktif untuk meredam ini semua,” imbuh Plt. Gubernur yang menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah menangani isu-isu yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Tampak hadir pula dalam Rakor hari ini di Aula Jayang Tingang, antara lain Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102/Pjg Brigjen Pol Purwo Sudaryanto, Kajati Kalteng Mukri, Kabinda Brigjen Pol M. Slamet Urip Widodo, dan Inspektur Sapto Nugroho, serta sejumlah Kepala SOPD terkait di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng. (ran/ben).

Plt. Gubernur Kalteng Ikuti Rakor Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020

Palangka Raya – Biro Adpim. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengikuti Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi (Rakor Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual melalui video conference dari kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (02/10/2020). Sehubungan dengan masih adanya kunjungan kerja di Kabupaten Barito Utara, Plt. Gubernur mengikuti Rakor Anev tersebut secara virtual bersama Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra.

Rakor Anev dipimpin secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Satuan (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo dan diikuti seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan tujuan digelarnya Rakor Anev ini yaitu untuk mendengarkan analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak yang sudah dimulai sejak 26 September 2020. Mahfud mencatat ada sejumlah permasalahan dalam Pilkada serentak antara lain ormas yang berpengaruh dengan niat baik dan tulus telah menyerukan penundaan Pilkada. “ Kita terima hal itu sebagai niat yang baik dan tulus semata untuk keselamatan rakyat. Tetapi pemerintah tetap harus mengambil langkah dan keputusan secara konstitusional dan institusional bahwa Pilkada tidak ditunda tetapi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ungkap Mahfud. Alasan tidak ditundanya Pilkada serentak telah disampaikan Mendagri dalam beberapa kesempatan antara lain perbandingan dari negara-negara lain yang melaksanakan Pemilu di masa pandemi dan ditunjukkan dengan angka kecenderungan penularan yang disampaikan Ketua Satgas Penangulangan COVID-19 Doni Monardo dalam beberapa rapat.

Dalam rakor tersebut, masing-masing sektor terkait menyampaikan analisis dan evaluasi sesuai kapasitasnya. KPU RI melalui Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan kendala kampanye dari laporan KPU di daerah antara lain beberapa daerah belum memulai kampanye karena masih menunggu ijin berkampanye, keterlambatan penyerahan desain APK dan bahan kampanye, data petugas kampanye, relawan, akun medsos terlambat disampaikan oleh paslon kepada KPU. Untuk itu langkah lanjutan KPU antara lain melakukan pantuan dan supervisi kepada KPU Provinsi/Kab/Kota lebih masif lagi. Sementara itu Kepala Bawaslu RI Abhan, melaporkan langkah-langkah pengawasan dan penindakan terhadap protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan kampanye. Hasil pengawasan kampanye pada hari ertama dan kedua masa kampanye ditemukan 19 pelanggaran protokol COVID-19 dan 94.846 penertiban alat peraga. Untuk itu Bawaslu memberi rekomendasi dan saran antara lain pelibatan Satpol PP pada tiap kegiatan kampanye dan penegasan perijinan kegiatan kampanye oleh kepolisian. Analisa dan evaluasi disampaikan pula oleh Kepala BIN RI, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua Satgas COVID-19 dan Mendagri.

Menkopolhukam Mahfud MD menyimpulkan penegakan protokol kesehatan sebagai kunci dalam kampanye Pilkada serentak. Metode penegakan protokol dilakukan melalui cara preventif, persuasif, dan penegakaan hukum tanpa pandang bulu.

Turut serta mengikuti Rakor Anev ini dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, antara lain Sekda Fahrizal Fitri yang didampingi oleh Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembanguan Nurul Edy, Kabinda Kalteng, Danrem 102/PJG, mewakili Kapolda Kalteng, mewakili KPU Kalteng dan Bawaslu Kalteng. (dew/nov/bow/fen)

Peserta Pilkada Serentak Kalteng Tahun 2020 Tanda Tangani Pakta Integritas Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

PALANGKA RAYA - BIRO ADPIM. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya, diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka, menghadiri acara Penandatanganan Pakta Integritas Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalteng terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalteng tahun 2020 yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, bertempat di Aula Eka Hapakat, Selasa (6/10/2020).

Pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalteng. Pakta Integritas juga diketahui dan ditandatangani Plt. Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Kajati Kalteng, Danrem 102/Pjg, Ketua KPU Provinsi Kalteng, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalteng, dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng.

Deklarasi berupa penandatanganan Pakta Integritas untuk Patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 bagi Peserta Pemilihan, baik Pasangan Calon Kepala Daerah maupun Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah tersebut dilaksanakan menyusul terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalteng tahun 2020 pada September 2020.

Dalam sambutan Plt. Gubernur Kalteng yang dibacakan Asisten I Hamka disebutkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri DaIam Negeri pada Rapat Koordinasi Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2020 yang diikuti unsur Pemerintah Pusat, Penyelenggara Pemilu, dan Forkopimda Provinsi.

“Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari PKPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19,” jelas Plt. Gubernur sebagaimana disampaikan Asisten I.

Lebih lanjut dikatakan Plt. Gubernur, Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Kalteng dilaksanakan dalam kondisi mewabahnya pandemi Covid-19. “Oleh karena itu, saya selaku Pemerintah Daerah tidak bosan-bosannya menekankan, mari kita bersama-sama, baik itu pemerintah, penyelenggara Pilkada, aparat keamanan, maupun masyarakat, taat dan disiplin pada protokol kesehatan atau yang biasa disingkat 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta penggunaan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang sekitar, dan menjauhi kerumunan,” paparnya.

Plt. Gubernur meyakini bahwa dengan taat pada protokol kesehatan, mata rantai penyebaran Covid-19 di Kalteng dapat diputus. Plt. Gubernur pun sangat mengapresiasi kegiatan penandatanganan Pakta Integritas ini. “Menjadi harapan bersama semua pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilkada tahun 2020, baik pasangan calon, tim pemenangan, partai politik, agar bersedia selalu menaati protokol kesehatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan, terlebih lagi pada saat pelaksanaan kampanye,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk menyambut baik dan turut menyukseskan gelaran Pilkada Serentak tahun 2020. “Jangan mudah terpancing berita hoaks, ujaran kebencian, maupun isu-isu SARA yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan kita serta kerukunan di Bumi Isen Mulang, Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah untuk Indonesia,” ajaknya.

Diingatkannya bahwa suksesnya Pilkada merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, penyelenggara Pemilu, aparat keamanan, partai politik, maupun masyarakat. “Suksesnya Pilkada kali ini tidak hanya dilihat dari angka partisipasi pemilih, situasi dan kondisi, suasana demokratis dengan asas LUBER dan JURDIL, tetapi juga ditambah jangan sampai pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 memunculkan kluster-kluster baru penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, mari kita arif dan bijaksana dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan. Suksesnya pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah akan mencerminkan kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang. Saya yakin dan percaya, dengan doa dan niat yang sungguh-sungguh dari kita semua, Provinsi Kalimantan Tengah dapat melalui bencana non alam Covid19 ini untuk menjadi semakin jaya,” pungkas Plt. Gubernur Habib Ismail. (ran/nov/sop)

DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENJADI FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI STRATEGI JANGKA BENAH

PALANGKA RAYA - BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Fahrizal Fitri menghadiri Seminar Memahami Strategi Jangka Benah Sebagai Solusi Penanganan Sawit Rakyat Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalteng, bertempat di Ballroom lantai 2 Hotel Bahalap Palangka Raya. Rabu (14/10/2020)

Dihadapan para peserta seminar Sekda menyampaikan arahannya, "Saya pikir ini adalah salah satu strategi yang cukup unik, yang mungkin nanti ada di Kobar satu, di Kotim satu ini merupakan awal percontohan. Berdasarkan data luasan tutupan sawit nasional pada tahun 2019, luas perkebunan sawit yang berada di Prov. Kalteng mencapai 1.178.702 Ha. Luasan tutupan perkebunan sawit tersebut menyumbang kurang lebih 11% dari luasan tutupan sawit nasional. Dengan luasan tersebut, prov. Kalteng berada di urutan ke-5 secara nasional dalam hal luas tutupan sawit setelah Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Ungkap Sekda.

Ditambahkan pula bahwa peranan sawit dalam pembangunan ekonomi tersebut tercermin dari besarnya sumbangan komoditas ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja dari berbagai lapangan usaha yang terkait dengan sawit dari hulu sampai hilir.

"Perlu disadari bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Prov. Kalteng yang salah satunya adalah keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan, baik yang dikelola oleh perusahaan/korporasi maupun oleh petani kecil atau yang dikenal dengan sawit rakyat." Ujar Sekda.

Merespon permasalahan sawit di dalam kawasan hutan ini, khususnya sawit rakyat, pemerintah telah menerbitkan beberapa instrumen regulasi dan kebijakan. Paket-paket regulasi tersebut antara lain: Inpres 8/2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit; Perpres 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Permen LHK no 83/2016 tentang perhutanan sosial; dan lain-lainnya. Namun demikian, menurut hasil kajian yang ada, regulasi yang ada tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan.

Karena itu berbagai terobosan solusi yang implementatif perlu segera dirumuskan. Solusi penanganan "keterlanjuran" sawit rakyat di dalam kawasan hutan yang tidak merugikan petani kecil, namun juga tetap mampu mendukung keberlangsungan fungsi ekologis kawasan hutan. "Kami menyambut gembira dengan konsep strategi jangka benah yang hari ini akan kita diskusikan secara mendalam untuk dapat diimplementasikan sebagai salah satu pilihan solusi yang dikedepankan untuk menyelesaikan persoalan sawit rakyat di dalam kawasan hutan." Terang Sekda.

Menutup arahannya Sekretarias Daerah, Fahrizal Fitri mengungkapkan "kami menyadari bahwa salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi strategi jangka benah adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semoga seluruh pihak dapat memberikan dukungan terhadap implementasi strategi jangka benah di Prov. Kalteng, dan dapat menjadi program dalam pengelolaan kawasan hutan yang sudah mengalami berbagai keterlanjuran pemanfaatan lahan untuk kebun kelapa sawit oleh masyarakat dan Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut memikirkan solusi keterlanjuran sawit rakyat di kawasan hutan di Prov. Kalteng." Ungkap Sekda.

Turut hadir pada seminar ini, yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, Pimpinan SOPD Pemerintah Prov. Kalteng, Kepala UPT Kementerian LHK di Kalteng, Kepala UPT KPH se-Kalteng, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalteng, Pimpinan Yayasan KEHATI, Perwakilan Petani Desa Pangkut Kotawaringin barat dan Desa Karang Sari dan Tim SJB Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. (din/eka)

Plt. Gubernur Kalteng Resmi Melepas Bantuan Sosial Beras Untuk Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Seruyan

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Tengah (Plt. Gubernur Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya secara simbolis resmi melepas Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Beras bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) untuk Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Seruyan di Lobby Utama Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, pada Senin pagi (19/10/2020). Bantuan Sosial Beras tersebut diberikan kepada 3.621 KPM di Kabupaten Katingan, 1.152 KPM di Kabupaten Gunung Mas, dan 1.829 KPM di Kabupaten Seruyan.

"Pada hari ini dilepas secara simbolis penyaluran Bantuan Sosial Beras bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Seruyan, yang merupakan bagian bantuan sosial dari Pemerintah Pusat. Kami harapkan agar bantuan beras yang disampaikan sesuai kualitasnya dan tepat sasaran", kata Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Plt. Kepala Dinas Sosial Rian Tangkudung, setiap KPM PKH menerima bantuan sosial beras sebanyak 15 kg/ bulan dalam kurun waktu selama tiga bulan, yakni Bulan Agustus – Oktober 2020. Adapun jumlah KPM PKH pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalteng yang mendapatkan bantuan beras sebanyak 49.203 KPM dengan total beras yang disalurkan sebanyak 2.214.135 kg.

Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail mengutarakan bahwa bencana pandemi Covid-19 menimbulkan dampak cukup besar terhadap segala aspek dan segmen populasi, secara khusus bagi kelompok masyarakat rentan. "Dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dirasakan oleh seluruh segmen populasi, khususnya kelompok masyarakat yang rentan, termasuk masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat terpencil," ungkap Plt. Gubernur Kalteng.

Lebih lanjut, Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail juga menjelaskan bahwa Program Penyaluran Bansos Sembako merupakan salah satu perluasan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan jaring pengaman sosial KPM PKH. Program ini sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain melalui Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Sosial Tunai.

Tujuan Bansos Beras adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras selama pandemi COVID-19. KPM PKH menjadi sasaran Bansos Beras dengan pertimbangan bahwa dalam keluarga peserta PKH terdapat anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan nutrisi. Selain itu, peserta PKH bukan merupakan sasaran program jaring pengaman sosial

yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Kementerian Sosial yaitu program Bantuan Sosial Sembako (BSS) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail juga menyebutkan bahwa program bansos yang dilakukan merupakan wujud nyata sinergitas antara instansi Pemerintah guna menanggulangi bencana pandemi Covid-19 dan bentuk perhatian Pemerintah kepada masyarakat. "Program Bantuan Sosial Beras ini juga menunjukan sinergitas antara berbagai instansi, yaitu Perum BULOG sebagai penyedia beras dan PT Bhana Ghana Reksa (BUMN) sebagai pihak transfortir yang akan mengantarkan beras langsung kepada KPM", imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menyalurkan berbagai bantuan sosial sebagai upaya membantu masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan sosial yang telah disalurkan meliputi bantuan tunai bagi 63.870 KPM, bantuan tunai bagi 1.000 anak luar panti, bantuan tunai bagi 1.662 penyandang disabilitas, bantuan tunai bagi 1.150 lanjut usia, bantuan sembako bagi 112.429 KPM, dan bantuan sembako bagi 750 anak dalam lembaga kesejahteraan sosial.

Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat melalui program-program bantuan yang disalurkan kepada Provinsi Kalimantan Tengah. "Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat. Semoga program - program tersebut dapat membantu dalam pemenuhan pangan dan nutrisi warga kurang mampu di Provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak pandemi Covid -19. Marilah kita bersama berdoa agar pandemi Covid -19 ini segera berlalu", pungkas Plt. Gubernur Kalteng.

Hadir pula mendampingi Plt. Gubernur Kalteng pada peresmian Penyaluran Bansos Beras tersebut, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Fahrizal Fitri dan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka. (renn/boy).

BAHAS PENGUATAN SDM PERTANIAN DI KALTENG, SEKDA TERIMA AUDIENSI KEPALA BPPSDMP KEMENTAN RI

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng, menerima audiensi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian RI (BPPSDMP Kementan RI) Dedi Nursyamsi beserta jajarannya, di Ruang Bajakah, Kantor Gubernur, Palangka Raya, Jumat (02/10/2020) pagi.

Kehadiran Kepala BPPSDMP Kementan RI bermaksud untuk kembali membahas program prioritas yang kini tengah menjadi perhatian yakni penguatan Food Estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian tidak hanya di wilayah Food Estate saja tetapi di Kalimantan Tengah secara keseluruhan.

Dedi Nursyamsi menyampaikan Food Estate telah menjadi perhatian bahkan prioritas bagi Presiden RI Joko Widodo, " Tentu saja ini diawali dari keseriusan kita agar mampu mengatasi masalah pangan sendiri," ungkapnya. Lebih lanjut Dedi menambahkan ke depannya Food Estate akan mengembangkan komoditas lebih luas seperti tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, sehingga yang paling penting adalah pengelolaan yang harus dikelola secara modern seperti perusahaan dan harus menguntungkan. " Pertanian harus dikelola secara mekanisasi yang esensinya adalah efisiensi dan produktivitas tinggi dari hulu ke hilir yang memberi keuntungan bagi petani. Petani harus menikmati keuntungan yang lebih besar," tegasnya.

Masih menurut Dedi, SDM pertanian memberi kontribusi terhadap peningkatan produktivtas paling besar yakni 50% selain inovasi teknologi dan kebijakan. " Kementerian Pertanian serius akan membangun SDM Pertanian termasuk di luar kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah," ujarnya. Salah satunya ditempuh melalui program Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan (Kostra Tani) selain itu Kementan RI juga akan terus mendorong pemberdayaan balai pertanian dan para penyuluh pertanian di Kalteng.

Sementara itu Sekda Fahrizal Fitri menyampaikan rasa syukurnya bahwa Kalteng dianugerahi luasan lahan kurang lebih 15 juta hektar atau 1,5 kali Pulau Jawa, lahan begitu besar ini masih banyak peluang yang bisa dikembangkan. " Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan lahan tersebut, diharapkan adanya proses pendampingan dari tenaga-tenaga penyuluh dengan spesialisasi di bidang masing-masing," ujar Sekda.

Mewakili Pemerintah Provinsi, Sekda Fahrizal Fitri menyambut baik apabila nantinya Food Estate ini juga dikembangkan dalam rangka pengembangan SDM di seluruh Kalteng. " Tantangan kita bagaimana mengubah konsep pertanian yang selama ini mengandalkan tenaga manusia, diubah dengan mekanisasi. Kita akan dorong petani milenial sehingga petani tidak lagi dipersepsikan sebagai orang yang selalu bercampur lumpur dan terik matahari namun dengan mekanisasi semua dapat diproses menggunakan mengunakan teknologi untuk kemajuan sektor pertanian seperti pola tanam, alat tanam dan penaburan benih menggunakan drone," imbuh Sekda sambil menekankan komitmen Pemprov untuk terus mendukung program pemerintah pusat di Kalteng.

Turut serta mendampingi Sekda Fahrizal Fitri yakni Kepala Dinas TPHP Prov. Kalteng Sunarti, serta Kepala OPD terkait lainnya. Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementan RI didampingi Kepala Pusat Pelatihan, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian dan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan RI. (dew/ben).

Sekda Kalteng Hadiri Rakordal dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2020

Palangka Raya - Biro Adpim. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri resmi membuka Acara Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2020 yang merupakan tahun keempat (4) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, bertempat di Aula Bappedalitbang, Rabu (21/10/20).

Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III tahun 2020 ini bertujuan untuk pencapaian penggunaan dan pencapaian RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang hasilnya dari adalah tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja serta Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pemprov Kalteng telah memiliki sumber daya manusia yang kapasitasnya mampu dalam pengelolaan SDA dan potensi daerah tersebut, namun keterbatasan anggaran APBD membuat pemerintah provinsi belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Pada Tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19, APBD Provinsi Kalimantan Tengah Direfocusing dan Direalokasi untuk penanganan Covid-19, yang mengakibatkan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan untuk tahun 2020 turut berubah, beberapa kegiatan menjadi ditunda dan beberapa lagi terlambat pelaksanaannya tidak bisa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dampak Pandemi Covid-19 juga menyebabkan perlambatan perekonomian baik skala nasional maupun di daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah yang sudah menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pada tahun 2020 ini mengalami perlambatan dikarenakan pandemi. Karena itu diharapkan kepada para Bupati/Wali Kota agar dapat melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing, khususnya untuk masyarakat yang ada di pedalaman dan belum tersentuh oleh pembangunan yang secara komprehensif dilakukan dengan membangun infrastruktur, sarana prasarana pendidikan, Kesehatan dan perekonomian masyarakat secara merata di segala bidang.

Anggaran yang terbatas memang jadi kendala tapi bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa, Pembangunan dapat tetap dilaksanakan dengan cara bertahap, karenanya proses perencanaan itu penting, susunlah perencanaan dengan skala prioritas, mendahulukan dan mengutamakan pada sasaran pembangunan yang belum tercapai target kinerjanya dan pada sektor pembangunan yang kondisinya belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan sangat penting untuk mengetahui sektor mana yang sudah dan yang belum tercapai dengan baik, sehingga pada perencanaan pembangunan tahun berikut kita bisa mengutamakan merencanakan pembangunan pada sektor-sektor pembangunan yang belum tercapai, demikian juga permasalahan-permasalahan dalam pembangunan dapat diketahui dengan segera dan dapat ditentukan solusi penyelesaian permasalahannya melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi. Sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perlu ditingkatkan untuk mencapai Kalimantan Tengah yang BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

“Terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan

pemerintah, saya minta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan harus sesuai jadwal yang ditetapkan, agar program/ kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran, khususnya penyerapan belanja langsung sebagai upaya percepatan terealisasinya target-target kinerja pembangunan sebagai salah satu komponen terbesar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan", ungkap Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Kalimantan Tengah pada bulan Desember 2020 akan melaksanakan Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, "Saya mengharapkan kerjasama dari seluruh komponen mulai dari KPU, Bawaslu, Kepolisian Daerah dan Komando Resort Militer agar dapat bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dapat bersinergi agar pelaksanaan pilkada serentak dapat terlaksana dengan aman damai dan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun Tenaga Kontrak di lingkup pemerintah Provinsi/kabupaten/kota Se- Kalimantan Tengah untuk dapat memperhatikan dan menaati ketentuan untuk menjaga netralitas ASN dalam pilkada ini Dalam kondisi pandemi COVID 19, saya minta kepada kabupaten kota dan pemerintah provinsi tetap fokus pada penanganan COVID 19, tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID 19", tegas Plt. Gubernur Kalteng. (may/nov/dmr)

PEMPROV KALTENG GELAR DIALOG DENGAN TIM KAJIAN DAERAH SETJEN WANTANNAS RI

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka, mewakili Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menerima kunjungan dan berdialog dengan Tim Kajian Daerah Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI di Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (20/10/2020).

Tim Setjen Wantannas terdiri atas 5 orang, yakni Brigjen TNI Karev Marpaung, Kolonel Arm Ganef Suwondo, Sri Rahayu Purwaningyyastuti, Kbp Yulias, dan Kolonel Laut (KH) Tantawi Jauhari. Tim akan mengadakan Pengkajian Daerah (Kajida) ke wilayah Provinsi Kalteng pada 20-23 Oktober 2020 guna mendapatkan informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan terkait ketersediaan pangan lokal dengan kandungan gizi baik serta pertumbuhan SDM usia produktif dan usia kerja di daerah.

Sasaran kegiatan pengumpulan data, peninjauan lapangan, dan dialog atau audiensi dengan instansi terkait di Kalteng kali ini adalah menciptakan manusia-manusia yang tumbuh dan berkembang secara optimal yang pada akhirnya dapat mewujudkan SDM berkualitas dengan tampilan fisik yang sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Untuk mewujudkan hal itu, dinilai harus ada upaya peningkatan pangan lokal dan gizi masyarakat karena permasalahan pangan lokal dan gizi masyarakat di daerah sangat mempengaruhi pertumbuhan diri pada SDM usia produktif dan usia kerja.

Sasaran Kajida lainnya adalah menyiapkan SDM berkualitas. Dalam hal ini, peran serta pemerintah dan masyarakat dinilai sangat menentukan dalam upaya peningkatan pemenuhan gizi dan pangan lokal terhadap masyarakat di daerah.

Dikatakan Brigjen TNI Karev Marpaung, berdasarkan data PBB, tingkat kualitas SDM Indonesia dinilai masih kalah dengan negara tetangga, seperti Malaysia. Namun, dari dialog dengan Plt. Gubernur Kalteng yang dalam hal ini diwakili Asisten I Setda Kalteng, Karev menilai bahwa sumber daya Kalteng hebat dan qualified karena mampu menangkap peluang pembangunan, antara lain dalam Program Food Estate di tengah maraknya aksi demonstrasi banyak pekerja di Indonesia terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Meski demikian, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi balita gizi kurang di Provinsi Kalteng sebesar 21,8% dan prevalensi stunting sebesar 34,04%. Sementara angka nasional menunjukkan prevalensi balita gizi kurang sebesar 17,7% dan prevalensi stunting adalah sebesar 30,8%. Di tingkat kabupaten di Provinsi Kalteng sendiri, terdapat 5 kabupaten yang memiliki angka stunting tinggi, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur yang mencapai 48%, Kabupaten Kapuas 41%, Kabupaten Barito Selatan 40,19%, Kabupaten Gunung Mas 38,21%, dan Kabupaten Barito Timur 42,05%.

"Kami sudah ke Kapuas dan ternyata Food Estate di Kalimantan Tengah ada di 2 kabupaten, yaitu di Kapuas dan Pulang Pisau. Nah, ini yang perlu dikaji. Ada daerah seperti Kapuas misalnya, yang di satu sisi melaksanakan ketahanan pangan dan di satu sisi prevalensi stunting tinggi. Jadi, kami putuskan ke Pulang Pisau untuk melihat juga ketahanan pangan di sana, bagaimana prevalensi stunting di sana. Kami akan mencoba sharing," papar Karev yang bersama timnya dijadwalkan meninjau secara langsung lokasi Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (22/10/2020).

Tidak hanya berdialog dengan Plt. Gubernur Kalteng yang dalam hal ini diwakili Asisten I Setda Kalteng, Tim Wantannas dijadwalkan juga melakukan dialog dengan Komandan Korem 102/Panju Pajang, Rektor Universitas Palangka Raya, Kadis Ketahanan Pangan Kalteng, Kadis Kesehatan Kalteng, Kadis Pertanian dan Peternakan Kalteng, Bupati Pulang Pisau, serta Kepala Koperasi Betang Asih. (ran/bow)

Plt. Gubernur Kalteng Ikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Secara Virtual

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Plt Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 secara virtual di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis pagi, 1 Oktober 2020. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Monumen Pancasila Sakti, Kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pada rangkaian upacara, Teks Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan dilanjutkan pembacaan UUD 1945 oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Kemudian pembacaan dan penandatanganan ikrar dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan dalam keadaan bencana pandemi Covid-19. Tampak seluruh pejabat yang hadir dan para petugas upacara di Monumen Pancasila Sakti menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan

masker dan menjaga jarak.

Pada tahun ini tidak semua peserta upacara dapat hadir secara fisik. Namun, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi para peserta tetap dapat mengikuti upacara dengan khidmat secara virtual melalui fasilitas konferensi video dan media sosial.

Turut pula hadir mendampingi Plt. Gubernur Kalteng mengikuti upacara di Aula Jayang Tingang Kapolda Irjen.Pol. Dedi Prasetyo, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Kajati Mukri, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri, Ketua Pengadilan Tinggi Mochamad Hatta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samparaja, Kabinda Brigjen Pol. Slamet Urip Widodo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng Hamka, Inspektur Provinsi Kalteng Sapto Nugroho dan sejumlah kepala perangkat daerah Pemprov Kalteng. (renn/eka)

Plt. Gubernur Kalteng Bersama Danrem dan Kapolda Luncurkan Program Si Komos

Palangka Raya - Biro Adpim.Plt. Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya bersama Danrem 102/PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto dan Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo melakukan Launching (Peluncuran) program Sarana Interaksi dan Komunikasi Sosial (Si Komos) usai kegiatan Ramah Tamah dalam rangka Peringatan HUT ke-75 TNI di Makorem 102/PJG, Kota Palangka Raya, pada Senin, 5 Oktober 2020.

Peluncuran Si Komos ditandai dengan pemotongan pita oleh Plt. Gubernur Kalteng, dan kemudian bersama Kapolda dilanjutkan dengan penyiraman air bunga ke Unit Roda Tiga Si Komos, serta pemecahan kendi oleh Danrem 102/PJG. Turut menyaksikan peluncuran tersebut di antaranya Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng Abdul Razak, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Mukri, dan Kabinda Brigjen Pol Slamet Urip Widodo.

Dalam sambutannya saat ramah tamah, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto menjelaskan bahwa Si Komos ini merupakan program sosial yang diinisiasi oleh Korem 102/PJG, dengan menggunakan kendaraan roda tiga untuk membantu masyarakat di wilayah terpencil atau pedalaman, yang sulit dijangkau mobil.

"Di akhir ramah tamah, saya akan melaksanakan launching Si Komos. Kenapa saya namakan Si Komos? Ini adalah Sarana Interaksi dan Komunikasi Sosial untuk tiga pilar, yaitu babinsa, bhabinkamtibmas, dan kepala desa, untuk bisa berinteraksi secara maksimal dengan masyarakatnya," jelas Danrem 102/PJG.

"Karena Si Komos ini nanti akan (melayani) perpustakaan, genset, sound, dan sarana pengeras suara atau pengumuman pada masyarakat di wilayah, khususnya di daerah terpencil atau daerah tertinggal, sehingga Si Komos ini bisa membantu kesulitan masyarakat," imbuh Danrem.

Sementara itu, dalam sesi wawancara, Plt. Gubernur Habib Ismail sangat menyambut baik program Si Komos yang digagas Korem 102/PJG. "Si Komos, program yang sangat luar biasa, untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk bisa meningkatkan minat baca daripada anak-anak kita di daerah pedalaman-pedalaman, pedesaan-pedesaan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil-mobil. (Kendaraan) roda tiga ini saya kira sungguh hebat. Bravo TNI, sinergi untuk negeri," ungkap Plt. Gubernur Habib Ismail Bin Yahya.

Plt. Gubernur Kalteng pun selanjutnya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peran TNI. "Menjaga kedaulatan di perbatasan, TNI bukan hanya perang, ternyata TNI juga kita lihat aktif di segala bidang, seperti karhutla, banjir, bahkan penanganan Covid-19. TNI memang benar-benar aktif berada di tengah-tengah rakyat," pungkas Plt. Gubernur Kalteng. (set/dmr)

Plt. Gubernur Kalteng Ikuti Upacara HUT ke-75 TNI Secara Virtual

Palangka Raya - Biro Adpim. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya mengikuti upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara virtual melalui konferensi video dari Aula Makorem 102/PJG, Kota Palangka Raya, pada Senin, 5 Oktober 2020.

Tampak pula hadir mengikuti upacara virtual HUT ke-75 TNI dari Aula Makorem tersebut, diantaranya Danrem 102/PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Kalteng Abdul Razak, Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Mukri, dan Kabinda Brigjen Pol Slamet Urip Widodo.

Upacara Peringatan HUT ke-75 TNI ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo selaku Inspektur Upacara. Turut hadir langsung dalam upacara di Istana Negara tersebut, yakni Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Tampak pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi tiga Pimpinan Matra TNI, yaitu KSAD Jenderal TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Meski berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, upacara HUT TNI yang digelar secara terbatas dan terpusat di Istana Negara Jakarta tetap berlangsung khidmat, dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Upacara ini diikuti secara virtual oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Negara, para Kepala Daerah, Forkopimda, serta seluruh jajaran TNI di pelosok tanah air. Tema yang diusung dalam peringatan HUT ke-75 TNI tahun ini adalah "Sinergi untuk Negeri".

Pada awal amanatnya, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan HUT ke-75 TNI. "Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Hari ulang tahun TNI ini bukan hanya dirayakan oleh anggota dan keluarga besar TNI di manapun berada, tetapi juga oleh segenap rakyat Indonesia," kata Presiden.

Selanjutnya, Presiden pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI yang selalu siap memenuhi panggilan tugas, setia mengawal Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Kontribusi TNI untuk bangsa dan negara bukan hanya melalui OMP (Operasi Militer untuk Perang) tetapi juga melalui OMSP (Operasi Militer Selain Perang), yang dengan sigap membantu rakyat yang sedang menghadapi bencana alam, termasuk dalam menghadapi pandemi Covid-19 sekarang ini," tutur Presiden.

Presiden kemudian berharap para prajurit TNI dapat selalu terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, serta kesiapsiagaan untuk menerima tugas. "Pegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Jaga terus kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadikanlah sinergi sebagai kekuatan membangun negeri, membawa Indonesia menjadi negara maju. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia," pungkas Presiden.

Lebih lanjut, dalam keterangan persnya Plt. Gubernur Kalteng menyampaikan ucapan ulang tahun dan apresiasi kepada TNI. "Kita ucapkan dirgahayu TNI yang ke-75. Memang peran TNI kita lihat sangat banyak, bukan saja menjaga kedaulatan NKRI, tetapi juga TNI aktif di tengah-tengah masyarakat, dalam penanganan segala kasus apapun, dari karhutla, banjir, bahkan penanganan Covid-19. Kita lihat peran TNI sangat vital, dan kita memberikan apresiasi pada TNI yang benar-benar dekat dengan masyarakat, selalu ada di tengah-tengah rakyat, dan bersinergi dengan siapa saja, dalam hal menjaga NKRI," ungkap Plt. Gubernur Habib Ismail Bin Yahya. (set/dmr)

Plt. GUBERNUR TINJAU RAPID TEST MASSAL DI BARITO UTARA

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya meninjau pelaksanaan Bakti Kesehatan dengan kegiatan Rapid Tes Massal dan Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat Lingkup Kabupaten Barito Utara, Kamis (01/10/2020) di Pasar Pendopo, Muara Teweh.

Kegiatan yang merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Polda Kalteng, Korem 102/PJG, Kajati Kalteng, dan Binda Kalteng menyediakan alat Rapid Test sebanyak 800 buah dari Pemerintah Provinsi dan 1000 buah dari pemerintah Kabupaten.

Bupati Barito Utara Nadalsyah dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sugianto Panala Putra mengatakan perkembangan kasus Covid-19 Kabupaten Barito Utara semakin hari semakin meningkat. Sampai dengan tanggal 30 September 2020 terdapat 289 kasus terkonfirmasi Covid-19 yang tersebar di 7 Kecamatan dan 17 Desa.

Oleh sebab itu, dalam rangka deteksi dini dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Barito Utara, Gubernur Kalimantan Tengah memberikan perhatian khusus kepada Barito Utara sehingga pada hari ini dilaksanakan Rapid Test Massal dengan target sebanyak-banyaknya untuk mengetahui sejauh mana penularan pandemi Covid-19 di Barito Utara.

“Untuk itu saya mengajak semua warga Muara Teweh agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan Bakti Kesehatan. Dalam situasi seperti ini kita semua harus bergotong royong untuk memerangi wabah virus tersebut, karena kita semua berperan untuk mencegah penyebarannya. Pemerintah hanya bisa memberikan imbauan kepada kita semua dan selebihnya kita masing-masing yang harus berupaya menghentikan dan menyadari bahwa virus ini memang berbahaya,” ungkap Bupati Barito Utara.

Plt. Gubernur Habib Ismail mengungkapkan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya dengan memperluas Rumah Sakit perawatan pasien Covid-19 dengan membangun 50 kamar perawatan.

“Kita harapkan pelaksanaan Bakti Kesehatan rapid test ini dapat berjalan dengan lancar, agar angka penyebaran Covid-19 di Barito Utara dapat ditekan, dan bila dalam pelaksanaan ditemukan hasil reaktif untuk beberapa orang akan dilakukan karantina mandiri dirumah selama 14 hari dan bila kemudian bergejala sebelum 14 hari dilakukan pemeriksaan lanjutan swab. apabila hasil swab positif dilakukan isolasi di RSUD Muara Teweh,” kata Plt. Gubernur.

Selain itu untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, masyarakat dihimbau dan diingatkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. “Cepat lambatnya pemutusan mata rantai penularan Covid-19 sangat tergantung peran serta dari masyarakat,” pungkas Habib Ismail.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan 5000 masker kain dan 1000 masker medis dari Pemprov dan Forkopimda Kalteng untuk masyarakat di Barito Utara.

Turut pula hadir dalam kegiatan ini yaitu Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara beserta Pejabat di Lingkungan Kabupaten Barito Utara. (win/nov/bow).

PLT. GUBERNUR KALTENG TINJAU PERTANIAN BAWANG MERAH DAN JARINGAN IRIGASI DI DESA TRANSBANGDEP, BARITO UTARA

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya didampingi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara beserta sejumlah Kepala SOPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng meninjau tanaman bawang, rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), dan optilasi lahan rawa (Opla) Serasi (Selamatkan Rawa Sejahtera Petani) di Desa Transbangdep, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Rabu (21/10/2020).

Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan demonstration plot (Demplot) atau proyek percontohan bawang merah kepada kelompok tani terpilih pada tanggal 17 Maret 2020 di masing-masing lokasi kelompok tani, antara lain di Lokasi Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Trahean dan Kelompok Tani Margomulyo Desa Transbangdep. Kepada kelompok tani, diberikan bantuan Demplot budidaya bawang merah dengan luas masing masing 0,5 hektare sesuai dengan pengalaman budidaya masing-masing kelompok tani. Karena itu, varietas bawang merah yang dikembangkan masing-masing kelompok berbeda, antara lain Varietas Bauji dikembangkan oleh Kelompok Tani Margomulyo dan Varietas Bima Brebes dikembangkan oleh Kelompok Tani Sri Rejeki. Dua varietas ini dikembangkan untuk mengetahui varietas yang paling baik hasilnya.

Demplot bawang merah merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil panen bawang merah dengan penerapan teknik budidaya yang baik. Melalui proyek percontohan ini diharapkan petani bawang merah dapat belajar langsung praktek budidaya bawang merah dengan penerapan teknik budidaya yang tepat serta petani diberikan bimbingan dan pelatihan dari para ahli maupun praktisi dalam pelaksanaan budidaya bawang merah. Selain itu, diberikan pendampingan dan monitoring secara berkala.

“Ini adalah percobaan yang pertama tanam bawang di lahan basah dan kita sudah beberapa kali panen bawang di lahan kering, alhamdulillah berhasil. Dari 1 biji bisa menghasilkan 10 sampai 12 bawang merah. Ini yang akan kita kembangkan untuk menjaga inflasi daerah dan juga untuk membantu para petani dalam perekonomian,” ungkap Bupati Barito Utara Nadalsyah.

Dalam kunjungannya, Plt. Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menyerahkan secara simbolis 800 pohon bibit buah lengkeng kepada 10 desa, yaitu Desa Hajak, Desa Lampeong 1, Desa Lampeong 2, Desa Batu Raya 1, Desa Batu Raya 2, Desa Malateken, Desa Pangkuh Raya, Desa Liang Naga, Desa Benangin, dan Desa Mampuak 2. Sedangkan 1.200 bibit porang, diserahkan kepada 2 kelompok tani di Desa Batu Raya 1 dan Desa Batu Raya 2. Saprodi optimasi lahan rawa Serasi berupa 1.290 liter herbisida, 860 liter NPK Cair, 2.150 liter pupuk cair, 430 botol pestisida, dan 1.720 botol fungisida diserahkan kepada 14 kelompok tani dengan luas lahan 728 hektare di 9 desa, yaitu Desa Majangkan, Desa Baliti, Desa Ketapang, Kelurahan Montallat II, Kelurahan Tumpung Laung I, Kelurahan Tumpung Laung II, dan Desa Pepas.

Bantuan Alsintan berupa mesin panen padi sebanyak 5 unit diserahkan kepada kelompok tani di 5 desa, yaitu Dusun Transbandep, Trising, Baliti, Trahean, dan Rarawa. Cultivator sebanyak 2 unit diserahkan kepada kelompok tani di 6 desa/kelurahan, yaitu Desa Trahean Kelurahan Melayu, Desa Batu Raya I, Desa Tongka, Mampuak I, dan Mampuak II. Mesin panen jagung sebanyak 5 unit diserahkan kepada kelompok tani di 5 desa, yaitu Desa Tongka, Mampuak 1, Mampuak 2, Rimba Sari, dan Batu Raya. Mesin pompa air diserahkan kepada kelompok tani di 2 desa, yaitu Desa Lemo dan Kelurahan Melayu. Alat tanam jagung sebanyak 8 unit diserahkan kepada kelompok tani di 2 desa, yaitu Desa Batu Raya 2 dan Desa Sei Liju.

Terakhir, tanda daftar varietas unggul lokal “Padi Talun Koyem” atas nama Kementrian Pertanian dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalteng diserahkan kepada Bupati Barito Utara yang disaksikan oleh Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya.

“Memang tinggal kemauan kita. Tanah kita luas, subur. Jangankan ditanam biji, dilempar tumbuh. Batang kayu dilempar tumbuh. Tinggal bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas itu semua dengan teknologi terbaru yang mutakhir, dengan mekanisasi bantuan bibit-bibit unggul bahwa tahun ini juga Food Estate Singkong Barito Utara mendapatkan 40.000 hektare. Dengan adanya program-program yang masuk Barito Utara, kita harapkan masyarakatnya yang dulu menyadap karet sementara bisa beralih namun profesi jadi petani dan menurut saya pribadi menginginkan dengan adanya foood estate dan pengembanganan teknologi pertanian sehingga pertanian ini dilirik oleh anak-anak muda dan masyarakat karena bisa menekan angka pertambangan tanpa izin atau pertambangan liar. Untuk itu, kita dengan adanya pertanian seperti ini harkat, derajat, dan martabat petani akan naik dan juga kata Presiden kemarin maunya itu yang seharusnya kaya itu petani karena kita makan dari petani. Kita mengharapkan itu semua, tapi satu hal lagi karakter kemandirian petani juga harus perhatikan,” terang Plt. Gubernur Kalteng.

Selepas meninjau lokasi lahan pertanian bawang merah dan saluran irigasi, Plt. Gubernur beserta rombongan melanjutkan peninjauan peternakan sapi potong Desa Transbangdep dan mengadakan pertemuan singkat dengan Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Transbangdep. (may/nov/dmr/eka/sop)

MENHUB TINJAU BANDARA BARU DI BARITO UTARA

MUARA TEWEH – BIRO ADPIM. Seusai menggelar rapat di VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Menteri Perhubungan (Menhub) RI didampingi Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya beserta Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan Dirjen Perhubungan Udara menuju Bandara Haji Muhammad Sidik di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara menggunakan pesawat khusus Kings Air.

Di Bandara Haji Muhammad Sidik, Menhub meninjau Bandara baru tersebut dan menggelar rapat di Ruang Tunggu Keberangkatan Terminal membahas rencana pengembangan runaway dan pembebasan lahan. Rapat kali ini antara lain juga juga diikuti Bupati Barito Utara, Kapolres Barito Utara, Dandim 1013/Mtw, dan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Beringin Muara Teweh.

Dalam rapat tersebut, Menhub menjelaskan, “Suatu keniscayaan yang Presiden inginkan bahwa daerah terluar harus dijangkau dengan konektivitas karena konektivitas diharapkan mampu menyatukan bangsa ini.”

“Presiden selalu mengatakan transportasi itu peradaban, seperti bagaimana mendapatkan harga yang relatif murah dengan cara mengambil barang dari pusatnya. Saya pikir hal ini akan memajukan Barito Utara dan Murung Raya,” imbuh Menhub Budi Karya yang berharap apa yang telah diupayakan saat ini bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan bahwa status lahan untuk runaway sepanjang 3 km sudah bebas dan tidak ada masalah.

Dijelaskannya, “Daerah akan berkembang karena keberadaan Bandara memicu pertumbuhan banyak sektor. Oleh karena itu, lahan di sekitar Bandara (Kawasan Operasional Penerbangan), lingkup itu, dalam mengeluarkan izin bangunan betul-betul sesuai petunjuk Dirjen udara untuk bangunan di sekitar Bandara.”

“Kita edukasi masyarakat agar menjaga lokasi obyek vital di sekitar Bandara. Area yang sudah dibebaskan agar dihibahkan ke Kementerian Perhubungan. Hal ini mencegah peruntukan lain jika berganti kepala daerah,” imbuh Lasarus yang memastikan bahwa pembangunan Bandara baru ini merupakan salah satu upaya pemerintah mempercepat kemajuan masyarakat di Kalteng.

Sementara itu, Plt. Gubernur Kalteng mengungkapkan bahwa Bandara di Muara Teweh ini yang paling representatif di antara beberapa Bandara di wilayah Barito. Mengingat posisinya yang berada di tengah, Bandara ini bisa mempercepat alur transportasi ke wilayah-wilayah yang menjadi tujuan khususnya, antara lain ke Palangka Raya.

“Selamat Pak Bupati dan Jajaran Perhubungan Udara di Muara Teweh. Semoga dengan kunjungan ini memotivasi kita makin bisa berbuat untuk daerah kita tercinta Barito Utara dan Kalteng umumnya,” ucap Plt. Gubernur yang juga mengucapkan terima kasih kepada Menhub atas arahan-arahannya.

Bupati Barito Utara Nadalsyah menjelaskan bahwa Bandara ini sudah lama pembangunannya. “Sebelum saya jadi Bupati sudah ada awal pembangunan, akan tetapi agak melambat. Saya bertemu Presiden Jokowi dan melaporkan tentang pembangunan Bandara ini. Pada 2019, sudah ada kucuran dana untuk penyelesaian Bandara ini. Dan tahun 2020, pesawat sudah bisa landing dan take off. Kami atas nama pemerintah Barito Utara dan masyarakat Barito Utara mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden yang sangat merespon usulan kami menemui beliau di Istana waktu itu,” papar Bupati Nadalsyah.

Bupati Nadalsyah juga berterima kasih kepada Menhub yang telah cepat menindaklanjuti usulan ini, sehingga Bandara Haji Muhammad Sidik bisa segera digunakan.

Disampaikannya pula bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara sedang mengadakan pendekatan dengan sejumlah maskapai, seperti Lion Air yang sudah meninjau Bandara ini. Pihaknya pun saat ini masih menunggu jawaban maskapai tersebut.

Untuk meningkatkan perekonomian setempat, pihaknya juga berencana mengundang perusahaan-perusahaan pertambangan, perkayuan, dan perkebunan untuk turut meramaikan Bandara ini nantinya. “Kita akan mengedukasi masyarakat di Barito Utara, para pedagang kecil dari desa kelurahan, kecamatan. Kita “ajarin” naik pesawat ke Jakarta. Kami ajarkan masyarakat berbelanja ke Jakarta, ke Tanah Abang, Mangga Dua, memilih barang dengan harga yang relatif murah untuk dijual kembali di desa, kecamatan, kelurahan dengan harga murah,” jelas Bupati Barito Utara.

Seusai meninjau Bandara Haji Muhammad Sidik, Menhub dan rombongan dijadwalkan menuju Bandara Tabelian di Sintang, Kalimantan Barat untuk meninjau Bandara dan menyampaikan paparan terkait pengembangan Bandara. (ran/dew/eka/sop)

Plt. Gubernur Kalteng Panen Padi di Kawasan Food Estate Desa Petak Batuah

PETAK BATUAH - BIRO ADPIM. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya beserta sejumlah Kepala SOPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng ambil bagian dalam panen padi di kawasan pembangunan dan pengembangan Food Estate di Desa Petak Batuah, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Sabtu (10/10/2020).

Sebelumnya, dari Kantor Camat Palingkau, Kabupaten Kapuas, rombongan Plt. Gubernur Habib Ismail menuju Desa Bentuk Jaya untuk meninjau proyek rehabilitasi jaringan irigasi di petak A5. Selepas meninjau jaringan irigasi, rombongan menuju lokasi panen raya Desa Petak Batuah di petak A2 dengan menggunakan motor. Tidak hanya panen padi dengan mesin combine harvester, Plt. Gubernur Habib Ismail juga melakukan dialog dengan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur menekankan bahwa Program Food Estate bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. “Kita perlu bersyukur juga bahwa tahun ini juga program untuk meningkatkan harkat, martabat, derajat, serta kesejahteraan petani akan segera diluncurkan di daerah kita ini, yaitu Program Food Estate,” ucapnya.

Menurut Plt. Gubernur, program ini dapat merangsang minat anak muda untuk bekerja di bidang pertanian. “Food Estate ini nantinya akan bisa merangsang anak-anak muda kita dan semua kita untuk eksis, untuk benar-benar menyukai dan bekerja di bidang pertanian. Apresiasi dan terima kasih kami ucapkan untuk Bapak/Ibu para petani yang sebentar lagi mungkin dalam Program Food Estate akan ikut bertani,” paparnya.

“Jadi, Program Food Estate ini yang pertama adalah intensifikasi, mekanisasi pertanian. Insya Allah kalau Food Estate jadi, nanti bantuan-bantuan dari Bapak Presiden, dari Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten akan Bapak/Ibu terima. Dan, itu juga untuk meningkatkan produktivitas. Apabila sebelumnya bisa menghasilkan 5 ton (beras), setelah Program Food Estate diluncurkan, 1 hektare (Ha) yakin bisa menghasilkan 7 sampai 10 ton,” papar Plt. Gubernur Habib Ismail.

Plt. Gubernur menambahkan bahwa kedatangan Presiden RI Joko Widodo pekan ini ke Kalteng adalah untuk memastikan bahwa Program Food Estate dan bantuan-bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani. “Niat Presiden adalah bagaimana caranya meningkatkan taraf hidup petani, sehingga petani menjadi sejahtera dan makmur,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa Program Food Estate ini tidak hanya untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga untuk meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan mendapatkan harga yang layak.

“Selama musim Covid-19 atau Corona ini, semua ekonomi ambruk, termasuk ekonomi negara-negara besar. Ternyata dari perekonomian itu, yang masih bagus, yang masih menahan perekonomian kita adalah pertanian. Pertanian menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar untuk Indonesia,” imbuh Plt. Gubernur Habib Ismail.

Sementara itu, tampak hadir dalam rombongan Plt. Gubernur Kalteng, antara lain Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, Kadis Lutkan Darliansjah, Kadis TPHP Sunarti, Kepala Biro Umum Setda Kalteng Lisda Ariyyana, dan Pokja Tim Pertanian Kalteng. (ran/bow)

PRESIDEN RI SERAHKAN BANTUAN PRODUKTIF UMKM BAGI MASYARAKAT PULANG PISAU

PULANG PISAU – BIRO ADPIM. Selepas kunjungan kerja meninjau lokasi tanam perdana Food Estate di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (8/10/2020), pada hari yang sama, Presiden RI Joko Widodo menyerahkan bantuan kepada sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat. Acara penyerahan Bantuan Produktif UMKM ini dilaksanakan di GPU Handep Hapakat Pulang Pisau, di mana tampak hadir Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya dan Plt. Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang.

Penerima bantuan Presiden ini, terdiri dari 15 orang Nasabah BRI dan 15 orang dari Nasabah BNI. Acara inipun disiarkan daring melalui video conference di beberapa titik, antara lain di BRI Kapuas, BRI Banjarmasin, BRI Batola, BRI Sampit, dan BRI Palangka Raya, serta di BNI Pulang Pisau, BNI Palangka Raya Jalan A. Yani dan Jalan R.T.A. Milono.

Presiden berpesan kepada penerima bantuan UMKM untuk bisa mempergunakan bantuan tersebut dan mempertahankanya sampai pandemi Covid-19 merda dan keadaan normal kembali. “Meskipun turun, bisa apa bisa bertahan, yang kita inginkan itu jangan sampai ada usaha Bapak/Ibu semuanya tutup, sehingga waktu keadaan normal itu memulainya sulit. Kalau sudah tutup, itu sulit. Bertahan terus sampai keadaan normal dan kita seolah nanti semuanya lebih baik dari yang sebelum-belumnya,” ucap Presiden Joko Widodo di hadapan para penerima bantuan.

Dalam arahannya, Presiden kembali mengingatkan

bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada pengusaha besar, tetapi juga menimbulkan dampak bagi UMKM. Bahkan, tidak hanya di Indonesia, dampak yang ditimbulkan Covid-19 juga dialami sekitar 250 negara lainnya di dunia. “Oleh sebab itu, saya minta semuanya tetap semangat kerja. Jangan sampai menyerah, jangan sampai usaha kita ini tutup semuanya. Harus bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi, bertahan sampai nanti keadaan menjadi normal kembali,” tegas Presiden.

“Hari ini, kita sampaikan bantuan modal kerja dan produktif kepada Bapak/Ibu sekalian agar Bapak/Ibu bisa bertahan sampai keadaan normal kembali. Setahu saya, di sini banyak usaha kecil mikro yang jualnya berbeda-beda. Ada yang di rumahan, ada yang pedagang kaki lima, ada yang usahanya di pasar,” papar Presiden Joko Widodo seraya berharap bahwa bantuan senilai Rp 2,4 juta per orang ini dapat kembali menaikkan omset para pelaku UMKM di Pulang Pisau. (ran/may/sop/ben/krissetpres)

Ketua Umum LASQI Kalteng Hadiri Pembukaan Musda LASQI Murung Raya Tahun 2020

PURUK CAHU - BIRO ADPIM. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Lembaga Seni Qasidah (LASQI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Hj. Rayuhani yang juga istri Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya, menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LASQI Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Murung Raya, Sabtu (3/10/2020).

Dalam sambutan Ketua Umum DPD LASQI Kabupaten Murung Raya periode 2015-2020 yang dibacakan Ketua Tim Kerja Musda LASQI 2020 Rahmanto Muhidin disampaikan bahwa salah satu prestasi yang ditorehkan LASQI Murung Raya adalah menghantarkan putri daerah terbaiknya, Ruslina, meraih juara tingkat nasional untuk kategori Bintang Vocalis Dewasa Putri pada tahun 2017.

Terkait penunjukan Murung Raya sebagai tuan rumah Festival Seni Qasidah Tingkat Provinsi Kalteng pada 2023 mendatang, pihaknya meminta dukungan semua pihak, khusunya Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya, untuk membantu kesiapan event tersebut.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini diwakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Kabupaten Murung Raya Marzuki Rahman mengungkapkan bahwa hasil kompetisi LASQI Murung Raya hingga kini masih diperoleh berdasarkan bakat alamiah, demikian pula dengan kompetensi pelatihnya. Sehingga diperlukan suatu wadah untuk menempa bakat-bakat berprestasi di kabupaten ini agar lebih baik lagi. “Kita kekurangan tempat untuk menempa bakat-bakat anak-anak. Idealnya, setelah ditemukan

bakat, dikarantina dan ditempa," jelasnya sembari menambahkan bahwa setelah mereka meraih juara juga perlu dipikirkan agar mereka mendapatkan reward atau penghargaan, seperti mendapatkan beasiswa pendidikan.

Selanjutnya, istri Plt. Gubernur Kalteng Hj. Rayuhani yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) LASQI Provinsi Kalteng meminta pihaknya dan DPD Kabupaten/Kota se-Kalteng meningkatkan soliditas. "Mari kita terus tingkatkan soliditas, kerjasama agar LASQI betul-betul mampu menjadi pioner dalam mewujudkan organisasi yang modern, mandiri, dan berprestasi," ucapnya.

Rayuhani juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus LASQI Kabupaten Murung Raya yang telah banyak berperan mewarnai kemajuan LASQI, baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional dengan berbagai prestasi. "Semoga berbagai keberhasilan tersebut akan semakin memotivasi kepengurusan DPD LASQI Kabupaten Murung Raya di periode-periode berikutnya," ucap Rayuhani.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang terus memberikan dukungan dan support anggaran bagi keberlangsungan DPD LASQI setempat dalam merealisasikan program-program organisasi.

Rayuhani beeharap Musda kali ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kemajuan organisasi dan siapapun yang terpilih memimpin LASQI harus didukung semua pihak agar program-program LASQI bisa terealisasi maksimal. "Semua pengurus harus solid. DPD LASQI juga harus mengembangkan organisasi hingga tingkat kecamatan bahkan kelurahan atau desa, sehingga syiar melalui syair dan upaya menjaga dan melestarikan budaya-budaya Islam bisa terus terlaksana di kabupaten ini," Rayuhani menekankan.

Saat membuka Musda yang akan berlangsung 3-4 Oktober 2020, Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph memberikan apresiasi kepada LASQI Kabupaten Murung Raya yang meski bentuk dalam waktu yang relatif singkat pada 2015 lalu, namun bisa menorehkan prestasi dengan predikat juara tingkat nasional untuk kategori Bintang Vocalis Dewasa Putri pada tahun 2017.

Bupati Perdie M. Yoseph berharap kepengurusan LASQI Murung Raya periode 2020-2024 dapat membuat terobosan, antara lain dengan merekrut generasi milenial. "Inovasi dan terobosan merekrut generasi milenial yang enerjik dan kreatif tapi tetap mempertahankan kearifan lokal," jelasnya.

Bupati juga berharap LASQI Murung Raya menjadi percontohan atau pilot project bagi LASQI Kabupaten/Kota se-Kalteng. Di samping itu, Bupati Murung Raya juga menyampaikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Seni Qasidah Tingkat Provinsi Kalteng pada 2023 mendatang.

Seusai acara pembukaan Musda LASQI Murung Raya tahun 2020, istri Plt Gubernur Kalteng yang juga Ketua Umum DPW LASQI Kalteng Hj. Rayuhani menyambut baik sejumlah masukan Bupati Murung Raya untuk perkembangan dan kemajuan prestasi LASQI di Murung Raya pada khususnya dan Kalteng pada umumnya. "Masukan Bupati akan saya bawa pada saat musyarawah-musyawarah di tingkat provinsi untuk menjadi terobosan dan masukan di program seni qasidah selanjutnya," ucapnya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Bupati Perdie M. Yoseph mengatakan bahwa secara pribadi dan mewaikili Pemerintah Kabupaten Murung Raya, pihaknya akan secara maksimal dan total mendukung upaya untuk merekrut anak muda milenial. "Ini agar anak muda di Murung Raya tidak berjibaku dengan aktivitas di luar sekolah yang sifatnya negatif, penguatan gaya hidup religinya dapat, seninya dapat, dan potensi dapat ditampung dalam seni qasidah, jadi berkarakter," jelas Bupati Murung Raya tersebut.

"Kita ingin LASQI di Kalteng ini, Murung Raya, jadi terobosan, percontohan. Seni qasidah, olah vokal, tidak nyanyi gitu aja tapi (diharapkan) bisa menyadarkan orang," imbuhnya. (ran/nov/bow).

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

mengucapkan

Selamat Memperingati
Hari Kesaktian Pancasila
1 Oktober 2020

INDONESIA MAJU BERLANDASKAN PANCASILA

http://www.biropkp.kalteng.go.id *http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/* *http://www.twitter.com/setda_kalteng*

@sekretariat.daerah.kalteng *buletin.isenmulang@gmail.com*